



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099203/2025**



DS:5881-8270-5913-4680

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
 4. Kode/Nama Satker : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
- Sebesar : Rp. 182.805.000 (SERATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp.	182.805.000
Rp.	182.805.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	182.805.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SIBOLGA (106) Rp. 182.805.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099203/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5881-8270-5913-4680

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

						Halaman : I A. 1
Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			182.805.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			182.805.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum			
		2. 01	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu			
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum			
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara			
		5. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan	1.500.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2,00	kegiatan	1.500.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	400,00	Perkara, Berkas Perkara	144.585.000
Rincian Output	:	01 BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	400,00	Perkara	144.585.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	169,00	Orang	36.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	169,00	Orang	36.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	2,00	Perkara, Berkas Perkara	720.000
Rincian Output	:	01 QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (PN)	2,00	Perkara	720.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099203/2025**



DS-5881-8270-5913-4680

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	182.805.000		Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	182.805.000			(2) RPLN	US\$	0	Rp.		0
2. PNBP	Rp.	0			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$	0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0			d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0			e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :					f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 005.03.2.099203/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5881-8270-5913-4680

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
 Kode>Nama Satker : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099203	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	-	182.805	-	-	-	182.805		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	182.805	-	-	-	182.805		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	182.805	-	-	-	182.805		
1049.AEA	Koordinasi (07.56 SUMATERA UTARA / KOTA SIBOLGA)	-	1.500	-	-	-	1.500	07.56	
	01 RM	-	1.500	-	-	-	1.500	106@	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (07.56 SUMATERA UTARA / KOTA SIBOLGA)	-	144.585	-	-	-	144.585	07.56	
	01 RM	-	144.585	-	-	-	144.585	106@	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (07.56 SUMATERA UTARA / KOTA SIBOLGA)	-	36.000	-	-	-	36.000	07.56	
	01 RM	-	36.000	-	-	-	36.000	106	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (07.56 SUMATERA UTARA / KOTA SIBOLGA)	-	720	-	-	-	720	07.56	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 005.03.2.099203/2025

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS.5851-8270-5913-4680

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
 Kode>Nama Satker : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	720	-	-	-	720	106@	
JUMLAH		-	182.805	-	-	-	182.805		

Jakarta, 02 Desember 2024
 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
 H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
 NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099203/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS 5861-8270-5913-4680

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099203	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	15.912	15.912	15.912	16.261	15.312	15.062	14.090	14.090	14.090	14.177	16.035	15.954	182.805
		BELANJA BARANG	15.912	15.912	15.912	16.261	15.312	15.062	14.090	14.090	14.090	14.177	16.035	15.954	182.805
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	15.912	15.912	15.912	16.261	15.312	15.062	14.090	14.090	14.090	14.177	16.035	15.954	182.805
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	15.912	15.912	15.912	16.261	15.312	15.062	14.090	14.090	14.090	14.177	16.035	15.954	182.805
		PERKIRAAN PENERIMAAN	4.311	4.311	4.311	4.311	4.311	4.311	4.311	4.311	4.311	4.311	4.311	4.327	51.748
		- PNB (425231)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50
		- PNB (425232)	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	159	1.820
		- PNB (425233)	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	15.060
		- PNB (425239)	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	2.907	34.818

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099203/2025
IV A. B L O K I R**



DS:5881-8270-5913-4680

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [099203] PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
099203	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA			
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	20.000	
	52 Belanja Barang	Rp.	20.000	
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
1049.AEA	Koordinasi			
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	750	
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan			
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	19.000	
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan			
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	250	
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099203/2025
IV B. C A T A T A N**



DS.5881-8270-5913-4680

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [099203] PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

tt.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002